

KORAN
DIGITAL

radar.

EDISI SABTU
7 OKT 2023

MEDIA

T E R D E P A N



PANEN RAYA MELON DI TELUK PANDAN,

KONTRIBUSI TOPANG KEBUTUHAN BUAH KUTIM



**Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional,
Kepala BPSDM Kaltim Masuk 10 Besar
dengan Nilai Sangat Memuaskan**



PANEN RAYA MELON DI TELUK PANDAN, KONTRIBUSI TOPANG KEBUTUHAN BUAH DI KUTIM

TELUK PANDAN - Saat kunjungan kerja ke Kecamatan Teluk Pandan, Rabu, (4/10/2023), Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman melakukan panen raya melon bersama Kelompok Tani (Poktan) Sumber Pangan di RT 14 Desa Teluk Pandan. Acara yang dijadwalkan pukul 09.00 WITA ternyata baru terlaksana pukul 15.30 WITA. Untuk keterlambatan tersebut Bupati menyampaikan permohonan maaf. Alasannya karena harus menghadiri acara pisah sambut Gubernur Kaltim di Samarinda.

Dihadapan Petani dan undangan, Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua petani di Kutim. Sebab menurutnya progres pertanian di Kutim terus berkembang dengan baik. Buktinya sebagai orang nomor satu di Pemkab Kutim, dalam dua tahun terakhir ini, ia kerap diundang Poktan untuk pelaksanaan panen raya. Seperti panen raya padi di Kongbeng, panen padi di beberapa tempat di Kaubun, panen semangka, panen bawang merah di Sangatta Selatan. Begitu pula acara serupa di Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bongan, Teluk Pandan serta Muara Wahau.

"Semangat petani alhamdulillah luar biasa. Pastinya saya akan terus mendukung pengembangan sektor pertanian. Melalui program Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP). Untuk memperluas lahan-lahan tani kita termasuk padi sawah seluas dua ribu hektare dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan beras dan buah-buahan di Kutai Timur," sebut Ardiansyah.

Namun demikian, dia mengaku butuh dukungan seluruh petani dan para pen-

yuluh pertanian untuk menyukseskan program agribisnis di Kutim. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan yang tak putus dari para pihak, Ardiansyah yakin sektor pertanian Kutim yang terus berkembang dapat menopang kebutuhannya sendiri di masa datang.

Mengenai usulan sumur bor yang dijadikan solusi mengatasi sistem irigasi dan pengairan ke lahan petani, Ardiansyah mengaku setuju.

"Tadi Ketua Poktan Pak Eko mengeluh sulitnya mendapatkan air untuk kebutuhan tanaman. Dan ini saya sampaikan setuju dan saya menyambut permintaan Pak Eko untuk didukung," kata Bupati.

Lantas Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan sumur dan meninjau lapangan menindaklanjuti permohonan tersebut. Dengan melibatkan pula para stakeholder seperti PT Indomindo Mandiri dan PT Pamapersada Nusantara agar program itu berjalan lebih maksimal.

Usai panen Bupati memborong 100 kilogram melon untuk dibagikan secara gratis kepada semua yang hadir. Selain bupati masing-masing OPD dan perusahaan juga membeli 100 kilogram. Total semangka yang dibeli hari itu adalah 1 ton dengan harga Rp 7.500 per kilogram. Acara panen turut dihadiri Camat Teluk Pandan Anwar, Kadisdukcapil Jumeah dan jajaran DTPHP Kutim, Kapolsek Teluk Pandan Ipda Feryanto, Babinsa Teluk Pandan Pelda M Manik, Anggota DPRD Kaltim Ismail, para petani serta masyarakat lainnya.

Sebelumnya Ketua Poktan Sumber Pangan Eko Wisono mengatakan, Poktan

yang diketuainya merupakan kelompok yang bergerak dibidang Komoditi Holtikultura dan Buah di RT 16. Berdiri sejak 2008 dengan anggota sebanyak 25 orang. Memiliki lahan seluas 28 hektare.

"Panen Poktan Sumber Pangan hari ini merupakan panen kedua seluas 1 hektare buah melon. Dengan tiga varietas yakni pertiwi, merling dan amanda. Kalau panen sebelumnya itu bisa mencapai 12 ton per hektare, namun kali ini agak berkurang karena cuaca," kata Eko.

Yaitu akhir-akhir ini banyak sumber-sumber air kering, sehingga penghasilan panen tidak seperti sebelumnya.

Sementara Kepala Bidang Holtikultura DTPHP Kutim Wahyudi Noor menyatakan terus mendukung pertanian di Kutim. Menurut Wahyudi Nor pada 2023 ini melalui APBD, hampir seluruh Desa Teluk Pandan akan menerima bantuan dari Pemkab.

"Tahun ini semua mendapatkan bantuan, termasuk Poktan Sumber Pangan yang diketuai Pak Eko, sudah dianggarkan dan tinggal proses. Kemudian disalurkan tahun ini juga," kata Yudi, sapaan karib Wahyudi Nor mewakili Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum yang saat ini sedang mengikuti Diklat Pimpinan di Samarinda.

Kepada para penyuluh, Yudi meminta agar bisa terus meningkatkan kinerja di lapangan. Memberikan informasi terkait inovasi pertanian. Serta meningkatkan kerja sama dan kolaborasi. Dia berharap sinergi yang baik dari semua pihak, yakni pemerintah, masyarakat, petani hingga swasta, dapat membuat pertanian di Kutim semakin maju. **(Rkt)**



PENTINGNYA PENGARSIPAN ARSIP STATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH



Arsiparis Ahli
Muda DPKD
Kaltim Dewi
Susanti MM

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan terus mengupayakan terciptanya tertib arsip di lingkungan Pemprov Kaltim, salah satunya adalah menampung arsip statis.

Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti menjelaskan Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah. Karena, masih memiliki nilai guna kesejarahan, walaupun telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan UU RI pasal 18 No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, diamanatkan bahwa setiap unit pencipta arsip memiliki tugas melakukan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dalam hal ini adalah DPKD Kaltim.

"Penyerahan arsip tersebut merupakan upaya pengamanan dan pelestarian arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah, bukti keberadaan (evidential), informasional (informational), dan intrinsik (intrinsic) DPKD Kaltim," ungkap Dewi.

Pada umumnya, arsip statis sudah berakhir nilai gunanya sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja bagi

unit pencipta arsip namun masih memiliki kegunaan yang lebih luas untuk kepentingan umum sebagai sumber informasi, bahan penelitian dan pembelajaran, atau nilai sejarah.

"Dari arsip kita akan bercerita soal kita dulunya Kaltim dan Kaltara itu satu provinsi, juga sejarah soal otonomi daerah dulu kita belum otonomi sekarang sudah otonomi, atau yang sekarang sejarah soal penetapan IKN, generasi mendatang pasti bertanya catatan sejarah soal penetapan IKN sebagai ibu kota negara Nusantara, yang dulunya ibu kota Indonesia di Jakarta dan sekarang di Kalimantan Timur," jelasnya.

Pentingnya pengarsipan oleh penyelenggaraan pengarsipan adalah untuk merawat dan melestarikan arsip, sebagai alat bukti jika terkendala hukum juga sebagai pacuan tolak ukur pedoman kinerja selanjutnya.

"Misalkan ada yang terkendala hukum maka arsip-arsip ini bisa jadi bukti, terus bisa juga dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang ingin meningkatkan target tahun mendatang, otomatis kita melihat kilas kinerja tahun lalu," ujarnya.

Selain itu juga arsip sebagai sumber bahan penelitian, seperti lembaga mahasiswa, pendidikan lembaga sejarah, Sebagai memori kolektif bangsa sumber sejarah baik itu untuk generasi sekarang juga untuk

generasi mendatang.

Lembaga - lembaga yang rajin setiap tahunnya menyerahkan arsip kepada DPKD Kaltim adalah BP-KAD, Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Bagian Umum Pemprov Kaltim yang membawahi sembilan biro.

"Jadi ada yang sudah dan ada pula yang masih bertahap mengirim arsip statusnya" katanya.

Dia berharap kepada lembaga perangkat daerah lain untuk memanfaatkan tempat arsipnya agar lebih memudahkan pengarsipan.

Bahkan saat ini Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan surat tentang penataan arsip Sekretariat Daerah Kaltim no 005/131726/DPK/V/31 Agustus 2023 mengatakan bahwa penataan pengelolaan arsip di semua perangkat daerah Kaltim, pengelolaan arsip dinamis statis pencipta arsip semua pemerintah di Kalimantan timur, arsip statis yang memiliki nilai guna wajib diserahkan, disimpan dan dilestarikan ke lembaga kearsipan Kalimantan Timur.

"Kita ingin mewujudkan sadar gerakan arsip disemua unit kerja, kiranya nanti setiap lembaga perangkat daerah Kaltim untuk melakukan koordinasi pengelolaan arsipnya ke DPKD Kaltim, kami tunggu," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor :Nicha Ratnasari


 PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

BPSDM KALTIM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR


 Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
 SEKDA PROV. KALTIM

 Dr. Akmal Malik, M.Si
 PJ GUBERNUR KALTIM

 Dra. Nina Dewi
 KEPALA DINAS BPSDM KALTIM


Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP

Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Kepala BPSDM Kaltim Masuk 10 Besar dengan Nilai Sangat Memuaskan

SAMARINDA - Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan 12 tahun 2023 yang digelar, Kamis (5/10/2023) di ruang auditorium Kantor Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda.

PKN ke-12 tahun 2023 ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintahan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kubar, Kabupaten Kukar,

Kabupaten Kutim, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahulu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Tampil sebagai perwakilan Pemprov Kaltim, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Kaltim Dra Nina Dewi MAP, disebutkan sebagai salah satu peserta yang masuk dalam 10 besar dengan kualifikasi sangat memuaskan.

Pelepasan peserta PKN dilakukan oleh Kepala LAN RI Samarinda, Adi Suryanto, yang turut dihadiri Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda, Muhammad Aswad dan juga oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara virtual.

Akmal Malik mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi

kepada para peserta PKN tingkat II angkatan 12 yang telah mengikuti pelatihan selama 4 bulan.

"Selamat kepada seluruh peserta, ini adalah capaian yang luar biasa dan saya sangat bangga melihat semangat dedikasi dan komitmen selama pelatihan ini" ujar Akmal Malik.

Pj Gubernur Kaltim ini juga mengatakan PKN merupakan wadah yang sangat penting dalam mengembangkan potensi kepemimpinan para kader terbaik bangsa.

"Dan melalui pelatihan ini juga telah memberikan wawasan pengetahuan yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang tangguh dan berkualitas," pungkasnya.

(ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATANDra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA. PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
GO GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Muallimin. (Istimewa)

Dinkes Kaltim Pertajam Implementasi Pergub Nomor 22

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Muallimin menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertajam pengimplementasian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan.

"Pergub ini telah lama ditunggu dan dirancang terkait pengelolaan pemerintahan di bidang kesehatan. Adanya tata kelola kelembagaan rumah sakit umum daerah (RSUD) di beberapa pasal menjadi lingkup Dinkes," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Jumat (6/10/2023). Menurut Jaya, Pergub itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan indikator kinerja antara Dinkes dan seluruh rumah sakit yang ada di Kaltim.

Kegiatan yang berhubungan dengan layanan harus dilaporkan atau disinkronkan dengan indikator yang sudah dibuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu merupakan kunci Dinkes harus sama dengan apa yang dilakukan seluruh rumah sakit sehingga tidak ada yang berbeda.

Jaya menyebut Dinkes adalah dinas yang

menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Disini ada badan pengawas rumah sakit yang nantinya akan difungsikan apabila banyak keluhan dari masyarakat.

"Masyarakat boleh menyampaikan keluhannya. Kemudian kalau di puskesmas punya keluhan bisa ke dewan pertimbangan klinik. Silakan buat pengaduan semacam meminta menjembatani kalau tidak puas. Jika mau yang lebih besar ada Ombudsman, langsung ke sini kalau ada laporan," imbuhnya.

Ditambahkan Jaya, di Pasal 17 Pergub Nomor 22 tahun 2023 disebutkan bahwa rumah sakit dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

"Hal itu sebetulnya sangat relevan sekarang tren publik harus meningkatkan mutu layanan agar masyarakat luas luas. Karena dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan itu sangat membantu dalam pengelolaan masyarakat itu sendiri. Semua rumah sakit menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," tutup Jaya. **(nta/adv/Dinkes).**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari


 PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

BPSDM KALTIM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR


 Dra. Sri Wahyuni M.PP
 SEKDA PROV. KALTIM

 Dr. Akmal Malik, M.Si
 PD GUBERNUR KALTIM

 Dra. Nina Dewi
 KEPALA DINAS BPSDM KALTIM


Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM. Sesi Foto bersama peserta.

160 PPPK Ikuti Orientasi BPSDM Kaltim

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang telah berhasil menggelar Orientasi 160 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

"Hari ini (kemarin, red) telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, terdiri dari 160 PPPK dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang," ujar Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

160 orang tersebut terbagi dari 4 angkatan yakni angkatan 68, 69, 70 dan 71. Setiap angkatan terdiri dari 40 orang PPPK, semua mengikuti orientasi pada 2 - 5 Oktober 2023 di Kantor BPSDM secara tatap muka atau

klasikal dan para peserta menginap selama 3 hari di Asrama yang ada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

Rina berharap semua ilmu yang telah didapat pada orientasi PPPK kali ini mampu diterapkan secara baik oleh 160 PPPK angkatan 68, 69, 70 dan 71.

"Semoga para peserta bisa memahami tugas dan peran serta fungsi dari PPPK itu sendiri," pungkasnya.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu di Hotel Mercure Samarinda, secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang pada Kamis (5/20/2023).

Dalam acara penutupan hadir pula Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**BPSDM KALTIM**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIMDra. Nina Dewi
KEPALA DINAS BPSDM KALTIM

(dari kiri) Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM.

BPSDM KALTIM DAN BKPSDM KOTA BONTANG SUKSES GELAR ORIENTASI PPPK UNTUK 4 ANGKATAN

SAMARINDA – Demi menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, angkatan 68, 69, 70, dan 71.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu, Kamis (5/10/2023) secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin, Samarinda Seberang.

Turut hadir pada agenda penutupan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti mewakili Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, Kepala BKPSDM

Kota Bontang Sudi Priyanto.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyebutkan pelaksanaan Orientasi PPPK ini hasil kerja sama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang.

"Hari ini, telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama kami dengan BKPSDM Kota Bontang," ujarnya.

Dengan ditutupnya acara ini Rina berharap semoga peserta Orientasi PPPK Kota Bontang ini memahami peran tugas dan fungsi sebagai ASN PPPK.

"Semoga dapat lebih memahami peran dan fungsi ditempat kerja dapat lebih memahami SOPK dapat lebih memahami tugas PPPK yang merupakan ASN Pemkot Bontang," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



RIBUAN WARGA PPU TERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN, PENYALURAN DITARGET RAMPUNG BULAN INI



**TREN KARHUTLA DI PPU MENINGKAT,
SELURUH PEMDES DIMINTA AKTIF
LAKUKAN PENANGANAN**

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat pelepasan dan penyerahan bantuan ke KPM, Jumat (6/10/2023).)



Robbi/MediaKaltimGroup

RIBUAN WARGA PPU TERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN, PENYALURAN DITARGET RAMPUNG BULAN INI

PPU - Sebanyak 9.899 keluarga penerima manfaat (KPM) di Penuh Paser Utara (PPU) menerima bantuan beras. Pj Bupati PPU Makmur Marbun menargetkan pendistribusian rampung Oktober 2023 ini.

Secara simbolis penyerahan dilakukan langsung oleh Makmur Jumat (6/10/2023). Ia juga sekaligus melaunching pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pusat.

Pada periode Oktober ini untuk didistribusikan di 3 kecamatan lainnya di PPU masing-masing kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku. Makmur meminta untuk percepatan pendistribusian cadangan pangan yang bersumber dari pemerintah pusat khususnya pada bulan Oktober ini.

"Saya minta untuk bantuan pangan ini agar dapat segera di-

distribusikan kepada para keluarga penerima manfaat yang ada di PPU. Tolong dinas terkait bantuan ini agar betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya," ungkapnya.

Ada beberapa alasan pemerintah pusat melakukan pendistribusian cadangan pangan ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengatasi krisis pangan dan mencoba mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.

Pemberian bantuan pangan tersebut tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Yang terpenting justru ke depan bagaimana masyarakat dapat semakin diberdayakan.

"Seluruh perangkat daerah yang bertugas, yang bertanggung jawab terhadap ketahanan

pangan ini harus bersinergi dengan stakeholders terkait. Harus biasa berkolaborasi" ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU, Mulyono mengatakan bahwa rentang September hingga November 2023 ini ada sebanyak 9.899 KPM. Jumlah itu dari empat kecamatan yang tersebar di 54 desa dan kelurahan di PPU.

Adapun bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebesar 10 kilogram setiap bulan kepada masing-masing keluarga.

"Diharapkan dengan pendistribusian CPP di kabupaten PPU tersebut bisa membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk dapat meringankan dampak adanya El Nino saat ini," tutupnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



Pusdalops BPBD PPU for MediaKaltimGroup

Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Penajam pada bulan Oktober 2023.

TREN KARHUTLA DI PPU MENINGKAT, SELURUH PEMDES DIMINTA AKTIF LAKUKAN PENANGANAN

PPU - Tren bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Penajam Paser Utara (PPU) kembali meningkat. Pemerintah Kabupaten PPU menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Pemerintah Desa (Pemdes) untuk aktif dalam melakukan bantuan penanganan.

Pemerintah Kabupaten PPU kembali mengeluarkan surat edaran kepada seluruh elemen yang harus siaga darurat pada hari Senin (2/10/2023). Surat Edaran ini bernomor 005/1533/TU-PIMP/506.BPBD Tahun 2023 dan berisi penekanan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes).

"Kami menekankan kepada seluruh OPD untuk terlibat dan berperan aktif dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan kebencanaan," ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Budi Santoso (6/10/2023).

"Kedua, kepala desa dan kepala wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT, diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat," lanjutnya.

Peran ini termasuk aktif dalam penanganan bencana dan penggunaan anggaran untuk penanganan bencana, khususnya di desa, yang

harus mengikuti peraturan yang berlaku.

"Kami menginstruksikan seluruh perangkat desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Terutama dalam hal larangan membuka lahan dengan cara membakar atau melakukan aktivitas lain yang membahayakan," tambah Budi.

Untuk diketahui, sejak Juli 2023, telah terjadi 70 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 137,27 hektar. Kejadian tersebut terbagi menjadi 49 kasus di Kecamatan Penajam dengan luas lahan terbakar mencapai 95,92 hektar, 6 kasus di Waru dengan luas lahan 5,15 hektar.

Sedangkan di Kecamatan Babulu, tercatat 14 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 35,45 hektar dan 1 kasus di Sepaku dengan luas lahan 0,75 hektar. Budi mengingatkan bahwa surat edaran ini juga mencakup penggunaan anggaran untuk mengatasi kekeringan atau karhutla. Penggunaan anggaran darurat ini harus dilakukan secara hati-hati.

"Bantuan (anggaran) yang dimaksudkan dalam keadaan tanggap darurat ini akan berbeda jika bantuan yang diberikan pada saat pasca bencana, seperti banjir yang terjadi kemarin," tutupnya. **(SBK)**



Deddy/RadarMedia

Situasi Kadisdikpora PPU Tinjau Lapangan Bersama Perbasi PPU. (

DISDIKPORA PPU DAN PERBASI GELAR KOMPETISI 3 ON 3 PJ BUPATI CUP 3X3

PPU – Jelang kompetisi Basketball Pj Bupati Cup Penajam Paser Utara (PPU) 2023 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) bersama Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) PPU meninjau kesiapan lapangan bola basket di Taman Alun-Alun.

Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin mengatakan pemantauan ini dilakukan agar beberapa kesiapan dapat terkoordinir secara baik dan lancar. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan sabtu (7/10/2023) mendatang.

“Kondisi lapangan saat ini sudah dalam kondisi siap pakai. Insya Allah pembukaan akan diawali dengan eksebisi dari Forkopimda,” ujarnya, Jumat (6/10/2023).

Kegiatan ini berlangsung setiap hari Sabtu sampai dengan malam harinya, dan pertandingan ini berlangsung sampai dengan Desember mendatang. Kategori yang dipertandingkan dalam ajang bola basket ini ialah pertandingan 3 on 3, dengan dibagi 2 kelas yakni Umum dan Pelajar se-PPU.

“Kegiatan berlangsung setiap sabtu sore sampai dengan malam saja, dan bergulir sampai dengan Desember 2023. Peserta dibagi menjadi 2 kelas yaitu umum dan pelajar se-PPU. Adapun jumlah peserta yang sudah mendaftar pada kelas Umum 10 Peserta dan Kelas Pelajar 12 Peserta yang akan digulir sistem Liga,” jelasnya.

Kegiatan ini dikakukan dalam rangka pemanfaatan ruang publik yang dianggap kurang dimanfaatkan dan kegiatan yang dilaksanakan pun bukan hanya olahraga saja melainkan menggandeng pula UMKM dan para Musisi, dalam hal ini Disdikpora tidak bekerja sendirian melainkan bersama Perbasi PPU.

“Pemanfaatan ruang publik di setiap Sabtu ini bukan hanya dibidang olahraga saja, akan tetapi dari UMKM dan Para musisi pun ikut handil dalam pemanfaatan ruang publik ini,” tutupnya.

Pewarta : Deddy

Editor : Nicha Ratnasari



JADI PENYANGGA IKN, BRIDA KUKAR LAKUKAN KAJIAN PEMENUHAN AIR BERSIH



**APBD-P KUKAR 2023, KECAMATAN
SEBULU KEMBALI DAPAT KUCURAN RP
21 MILIAR UNTUK INFRASTRUKTUR**



Suasana seminar terkait ketersediaan air bersih untuk IKN yang diselenggarakan BRIDA Kukar.

JADI PENYANGGA IKN, BRIDA KUKAR LAKUKAN KAJIAN PEMENUHAN AIR BERSIH

TENGGARONG - Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara (BRIDA Kukar) menggelar penelitian dan melakukan kajian, terkait ketersediaan air bersih. Di man

a Kukar merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), bersama Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Pembangunan Daerah BRIDA Kukar, Karno, seminar sendiri diawali dengan seminar pendahuluan untuk mengkaji metodologi penelitian. Dilaksanakan di ruang Kantor BRIDA Kukar, pada Senin, 2 Oktober 2023 lalu.

"Kegiatan penelitian ini ingin memprediksi kebutuhan air di daerah sekitar IKN," jelas Karno.

Penelitian ini pun dianggap penting, lantaran kurang dari satu tahun lagi IKN segera

diresmikan. Sedangkan Kukar yang beririsan langsung dengan IKN, akan terdampak dengan kepindahan ibu kota negara tersebut. Yakni adanya indikasi kepindahan penduduk yang masif pada sejumlah wilayah perbatasan IKN dan Kukar. Membuat nantinya kebutuhan air baku oleh masyarakat turut meningkat.

"Terutama bagi wilayah yang berdekatan langsung dengan IKN, seperti Kecamatan Sangasanga, Loa Kulu dan Loa Janan," sabung pria tersebut. Apa lagi air menjadi kebutuhan primer manusia untuk dipergunakan setiap hari.

"Dengan adanya IKN, pasti ada migrasi penduduk. Sehingga, berkaitan dengan penyediaan air bersih harus kita persiapkan," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Pemkab Kukar Hadirkan Festival Pesisir di Kecamatan Muara Badak

TENGGARONG - Setelah Ku-
karLand Festival 2023, sukses
menghentak Kalimantan. Kini,
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Pemkab Kukar)
siap meluncurkan festival lain-
nya, hingga akhir tahun 2023 ini.
Yakni dengan menyiapkan Festi-
val Pesisir 2023, yang terfokus di
Kecamatan Muara Badak, tepat-
nya di Pantai Panrita Lopi.

Festival rencananya akan di-
gelar pada pekan kedua Oktober,
yakni selama 3 hari. Semenjak
tanggal 13-15 Oktober 2023, den-
gan menggandeng Tirtonegoro
Art Festival. Menjadikan Festival
Pesisir menjadi event bertaraf
nasional.

Sebanyak 6 kegiatan festival
ala pantai yang diselenggarakan.
Di antaranya, Lomba Tari Pesisir,
Pertunjukan Seni dan Budaya,
Lomba Baca Puisi, Lomba Domi-
no, Lukis Kanvas dan Jalan Santai.

Di dalamnya pun juga akan
dilaksanakan permainan tra-
disional, pemutaran film, gelar
UMKM, pesisir coffee, Talkshow
Pemuda Pesisir, parade musik.
Juga ada outbond pesisir, demo
masak, lomba lari, voli pantai,
pemuda inovatif, sepak bola pan-
tai dan penyematan Duta Pesisir.

Selain itu juga ada pemaparan
dari Komunitas Anak Nelayan,
mengenai cara membuat alat
tradisional menangkap kepiting
"Rakang". Tutorial mencabut duri
ikan Bandeng, mengenali ciri-ciri
ikan segar dan cara menangkap
ikan "Ijar Pesisir".

"Ya, Festival Pesisir ini kegi-
atan untuk memberikan edukasi
tentang pariwisata, serta edukasi
seni dan budaya di Kaltim," ucap
Rahmat Azazi, penyelenggara
Festival Pesisir 2023.

Kegiatan ini pun kembali di-
gelar, lantaran adanya dukungan
dari pihak Pemkab Kukar yang
lagi konsentrasi untuk men-
dukung event-event garapan



Flyer Festival Pesisir 2023 yang dilaksanakan pekan kedua Oktober 2023.

pemuda. Dimana, sebelumnya
dukungan datang dari Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf).

"Selain dengan Pemkab Kukar,
kita juga bekerjasama dengan
berbagai pihak, seperti pengelo-
la Pantai Panrita Lopi yang telah
menyediakan tempat," jelasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Kukar,
Rendi Solihin, pun menyambut
baik event garapan Tirtonegoro
Art Festival ini. Karena memang

melibatkan para pelaku usa-
ha kreatif dan UMKM. Menjadi
komitmen pemkab untuk men-
dukung aktivitas positif yang di-
gelar pemuda-pemuda Kukar.

"Kapan lagi ada acara seperti
ini, bisa menikmati parade musik,
pertunjukkan kesenian, sekaligus
liburan di pantai. Makanya, ayo
kita ramaikan event ini," pung-
kasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Sesi foto bersama Disnakertrans Kukar dan 2 SMK penerima BKK.

2 SMK di Kukar Terima BKK dari Disnakertrans

TENGGARONG - Sebanyak 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kutai Kartanegara (Kukar), menerima surat tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar. Diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Muhammad Hatta.

Penyerahan yang dilaksanakan pada Kamis (5/10/2023) lalu ini, diterima oleh kepala SMKN 1 Samboja dan kepala SMKN 1 Muara Jawa. Sebelumnya ada sebanyak 8 SMK yang meminta tanda daftar untuk BKK. BKK inilah yang menjadi lembaga yang dibentuk di SMK, sebagai unit pelaksana memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja.

Kepala SMK membentuk itu supaya anak didik setelah selesai menempuh pendidikan, lulus sekolah diarahkan ke pekerjaan nanti. "Sekolah menggaet perusahaan yang ada di sekitar lembaga pendidikan SMK yang ada di masing-masing kecamatan," jelas Hatta, Jumat (6/10/2023).

Hal ini juga mengikuti adanya perbup pelimpahan wewenang ke kecamatan, sehingga dengan adanya surat terdaftar ini maka SMK tersebut diperbolehkan membuka pelayanan kartu kuning atau kartu pencari kerja (AK-1).

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (P3K) Disnakertrans Kukar, Syarifah Rosita menjelaskan para pencari kerja yang berada dari kecamatan-kecamatan jauh itu tidak harus lagi jauh ke Kantor Disnakertrans Kukar cukup melalui BKK di SMK tersebut.

Jadi alumninya khusus SMK tersebut bisa didata, tapi tidak melayani SMA, karena bursa kerja khusus ini untuk SMK," ucapnya.

Dirinya menyebut surat tanda daftar yang diberikan juga akan dilakukan revisi. Jika kemudian hari ada perubahan atau pergantian kepala sekolah. "Harus lapor ke kami, maka surat tadi akan kami rubah lagi," tambahnya.

Kepala SMK Negeri 1 Samboja, Syafril usai menerima surat tanda daftar ini berharap bisa membantu alumni sekolahnya untuk mempercepat memperoleh pekerjaan.

"Insya Allah dengan diterbitkannya surat tanda daftar, maka SMK Negeri 1 Samboja bisa mengeluarkan kartu kuning, sehingga penelusuran bisa lebih mudah. Karena kami sudah bisa melacak yang kerja atau tidak," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Istimewa

Camat Sebulu, Edy Fahrudin.

APBD-P Kukar 2023, Kecamatan Sebulu Kembali Dapat Kucuran Rp 21 Miliar untuk Infrastruktur

TENGGARONG - Proses pembangunan di Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjalan hingga akhir tahun 2023 ini. Terutamanya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Camat Sebulu, Edy Fahrudin, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata di 14 desa.

Edy melanjutkan, total kucuran anggaran tambahan yang masuk di Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar, senilai Rp 21 miliar. Nantinya akan meliputi pembangunan, peningkatan dan perbaikan akses jalan antar wilayah di Kecamatan Sebulu. Namun Edy tidak secara mendetail panjang jalan yang akan dikerjakan.

“Tujuannya lagi-lagi ya untuk memudahkan masyarakat dalam hal mobilitas barang dan jasa, biar sembako enak,” ungkap Edy, Jumat (6/10/2023).

Edy menyebut, anggaran yang masuk di Kecamatan Sebulu ini berasal dari berbagai sumber. Dan dikerjakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar.

“Kalau rata-rata hampir semua jalan di kecamatan kita klir, bahkan nanti juga ada pembangunan jalan lingkungan yang ditopang melalui APBDes,” tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala Bidang P3K Distransnaker Kukar, Syarifah Rosita (kiri). (Istimewa)

Akhir Oktober, Disnakertrans Kukar Gelar Job Fair di Loa Janan

TENGGARONG - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kutai Kartanegara, berencana menggelar Job Fair. Dengan menggandeng Bursa Kerja Khusus (BKK) dari 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Loa Janan.

Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, sejak tanggal 21-22 Oktober 2023 mendatang dan akan mempertemukan para alumni dari 4 SMK dari Loa Janan. Masing-masing dari SMK Bhakti, SMK Muhammadiyah, SMK Purwajaya dan SMK Prasetya Budi Luhur dengan sejumlah perusahaan setempat.

"Job Fair tersebut akan mempertemukan perusahaan dengan alumni SMK tersebut," jelas Kepala Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (P3K) Disnakertrans Kukar, Syarifah Rosita.

Syarifah Rosita menyebut hingga saat ini belum bisa dipastikan akan ada berapa banyak lowongan pekerjaan yang disediakan. Sebab masih dalam tahap proses pendataan perusahaan yang akan dijadwalkan mengikuti agenda Job Fair. "Belum mengetahui berapa banyak, tadi baru mengajukan proposal ke perusahaan perusahaan untuk ikut serta dalam Job Fair," lanjutnya.

Job Fair ini diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja putra-putri alumni dari lulusan 4 SMK tersebut. Bagi para alumni yang ingin mendaftar nantinya diarahkan untuk membuat kartu kuning atau kartu pencari kerja yang diterbitkan oleh 4 SMK yang sudah terbentuk BKK dan menjadi mitra Disnakertrans Kukar tersebut. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



KOMISI II KONSULTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2023 DENGAN BPKAD DAN SETDA

BACA HALAMAN A2

**Ketua Komisi II Minta Semua
Aktivitas Pemerintah
Berdampak ke UMKM**





YUSVA ALAM

Rapat kerja Komisi II DPRD bersama BPKAD dan Setda Bontang.

Komisi II Konsultasi PP Nomor 53 Tahun 2023 dengan BPKAD dan Setda

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang mengadakan konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Bontang dalam rapat kerja terkait Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Senin (3/9/2023).

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, bahwa pihaknya mengadakan konsultasi tersebut lantaran ada beberapa hal yang perlu ditanyakan pada aturan terbaru tersebut. Walaupun PP tersebut baru saja terbit, serta belum ada Permendagri, belum ada peraturan keuangannya, bahkan belum terdapat perwalinya.

“Aturan ini masih lama berlakunya. Masih banyak yang perlu dibahas. Tapi

sejak awal kami sudah tanyakan terlebih dahulu beberapa hal,” ujarnya.

Dalam PP tersebut diatur tata cara perjalanan dinas dan pembelanjaan, namun tidak mengatur tata cara belanja perjalanan dinas DPRD.

Dikatakannya, sebelumnya bentuk aturan belanja perjalanan dinas itu adalah headcost, artinya setiap anggota dewan melaksanakan perjalanan dinas, maka semua pengeluaran selama dinas seperti biaya hotel, transport, dan sebagainya harus disetorkan bukti atau kwitansinya.

Namun dengan adanya PP Nomor 53 Tahun 2023 ini terdapat perubahan aturan belanja dinas menjadi sistem lumpsum, yang berarti sudah terdapat limit anggaran belanja dinas yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Kalau lumpsum itu misalnya kami

perjalanan dinas ke Jakarta. Terus kami diberikan budget Rp 5 juta, nah apapun yang terjadi ya budgetnya segitu. Kalau ternyata pengeluaran kami lebih dari limit ya resiko ditanggung sendiri, tapi kalau lebih alhamdulillah,” bebernya.

Lumpsum ini bukan berarti tidak ada lagi dokumen atau bukti pembayaran. Tetap ada, namun nantinya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak perlu lagi mengecek ke hotel dan lain-lain. Bakal lebih sederhana, cukup mengetahui benar atau tidaknya anggota legislatif ini dinas atau tidak.

“Dengan terbitnya PP ini diharapkan tidak didapati lagi temuan-temuan oleh BPK. Semuanya akan lebih sederhana, karena ada regulasi yang mengatur limit belanja perjalanan dinas tersebut,” pungkasnya. (al/adv)



IST

Ilustrasi UMKM.

Ketua Komisi II Minta Semua Aktivitas Pemerintah Berdampak ke UMKM

BONTANG – Pasca pandemi covid-19 semua yang dilakukan Pemkot Bontang harus berdampak kepada UMKM. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD, Rustam beberapa waktu lalu.

Menurut Rustam, selama pandemi covid-19 perekonomian benar-benar terpuruk. Termasuk para pelaku UMKM yang penjualannya rata-rata merosot tajam.

Pasca pandemi para pelaku UMKM pun berjuang untuk kembali memulihkan usahanya. Karenanya Rustam meminta agar pemerintah ikut membantu pemulihan usaha para pelaku UMKM tersebut.

"Memulihkan sebuah usaha yang terpuruk itu berat. Dengan bantuan pemerintah semoga upaya tersebut menjadi ringan dan mudah bagi teman-teman UMKM," ujarnya saat diwawancara awak media di ruangannya.

Ia memberi contoh, dengan seringnya Pemkot Bontang mengadakan event yang termasuk

dalam agenda event 77 wisata. Seharusnya event-event tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu pelaku UMKM.

"OPD yang menyelenggarakan event tersebut bisa memberikan harga sewa murah pada stan-stan yang disediakan. Sehingga para pelaku UMKM yang ingin menyewa merasa dimudahkan dan bisa mendapatkan profit dari penjualan di event itu," bebernya.

Ditambahkannya, event-event wisata ini juga seharusnya mampu menarik orang-orang dari luar Bontang untuk datang ke Bontang. Jangan sampai event tersebut hanya dinikmati orang Bontang saja.

"Kalau orang-orang luar dari Bontang berdatangan tentu akan memberikan multiplier effect bagi pelaku usaha. Seperti hotel-hotel dan penginapan, toko oleh-oleh, travel, dan lain sebagainya akan mendapatkan dampak positif dengan meningkatkan penjualan," pungkasnya.

(al/adv)



Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam saat diwawancara awak media.

Legislatif Minta Nomenklatur OPD Tak Tepat Dipisahkan

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyatakan ada beberapa OPD yang dirasa tidak tepat nomenklaturnya. Pemkot Bontang harus memisahkan nomenklatur OPD tersebut sesuai bidangnya masing-masing.

Dirinya mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Bidang kebudayaan tidak tepat bila dipasangkan dengan pendidikan. Karena menurutnya, kebudayaan yang dimaksud tersebut bukan kebudayaan untuk pembelajaran tetapi kebudayaan yang dapat menarik minat orang untuk menonton.

"Contohnya event Bontang City Carnival (BCC) dan Pesta Laut di Bontang Kuala. Saya heran kenapa kok yang garap Disdikbud bukan Dispopar. Seharusnya disitu ranahnya wisata karena dapat menarik orang-orang datang menyaksikan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini pun menyayangkan kenapa Disdikbud mengurus pembangunan sekolah. Seharusnya Disdikbud fokus pada pendidikan, seperti bagaimana membuat pengajaran yang baik,

meningkatkan akreditasi guru, meningkatkan SDM pengajar, dan lain sebagainya.

"Pembangunan sekolah serahkan saja pada ahlinya Dinas PUPRK, jangan lah Disdik yang ngurus juga. Setelah selesai dibangun baru serahkan ke Disdik untuk mengelolanya. Biarkan masalah infrastruktur diurus oleh OPD yang sesuai," ungkapnya.

Selain itu ia juga mencontohkan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) seharusnya fokus pada bidang pariwisata saja. Jangan lagi digabung dengan bidang-bidang lainnya.

"Kalau Pemkot mau majukan wisata ya biarkan Dispopar fokus pada bidang wisata saja. Jadinya Dinas Pariwisata. Kalau mau ditambahkan bidangnya yang harus sesuai, seperti kebudayaan. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," imbuhnya.

Karenanya ia meminta agar nomenklatur OPD-OPD yang tidak tepat ini dipisahkan. Sehingga OPD dapat fokus pada bidangnya masing-masing. Sehingga hasilnya bisa maksimal dan membantu meningkatkan progres pembangunan oleh Pemkot Bontang. (al/adv)



Buaya Riska yang saat ini berada di kandang karantina di Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan.

Buaya Riska Dikarantina di Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan

BALIKPAPAN - Penangkaran Buaya Tritip telah menerima buaya fenomenal "Riska" pada Rabu (4/10/2023) dini hari sekitar pukul 04.00 wita. Kedatangan Buaya Riska ini berdasarkan permintaan BKSDA Kaltim yang menerima sejumlah keluhan masyarakat Kawasan Guntung, Bontang perihal adanya buaya yang memangsa manusia.

Pengelola Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan, Arif Anggoro mengatakan, pihaknya hanya menerima seekor buaya dari Kota Bontang. Namun, kepastian apakah itu Buaya Riska atau bukan pihaknya tidak bisa memastikan.

"Tapi kemarin Pak Ambo itu datang ke sini dan menemui buaya tersebut. Sehingga kemungkinan memang benar itu Riska," ujarnya, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut Arif menjelaskan, buaya yang diterimanya tersebut memiliki panjang 4,42 meter dengan jenis kelamin jantan. Saat ini buaya tersebut sedang mengalami karantina di kandang terpisah.

"Kami karantinakan di salah satu kandang, kami

sebut itu kandang pembesaran nomor 5. Dalam kolam itu ukuran 6x12 meter, dia sendirian," jelasnya.

Dikatakan Arif jika di Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan menerima titipan buaya dari manapun, termasuk dari lembaga konservasi.

"Harus dikarantina selama 3-7 hari. Jadi dimohon tidak melakukan aktivitas berlebihan di sekitar kolam tersebut selama karantina," tambahnya.

Saat ini kondisi Buaya Riska dalam keadaan baik-baik saja dan masih dalam masa kelelahan usai perjalanan cukup jauh.

"Buaya Riska dalam keadaan baik-baik saja. Namun selama berinteraksi, belum mau makan. Karena Pak Ambo datang itu baru hari kedua, mungkin masih jetlag ya kalau manusia," ujar Arif lagi.

Buaya Riska terus mendapat pemantauan dari pihak BKSDA Kaltim selama berada di Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan ini. Nanti setelah selesai karantina, jika kondisinya masih normal akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar lagi.

Penulis: Aprianto

Editor: Yusva Alam

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Makin Mengkhawatirkan?

KEKERASAN terhadap perempuan terus terjadi dan mengalami peningkatan selama 2023. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Bontang, Kaltim masuk pada fase mengkhawatirkan. Hal itu terungkap dari catatan DPPKB, yang terhitung awal tahun ini sampai Agustus pihaknya menangani 87 kasus.

DPPKB diminta gencar melakukan pencegahan dengan melibatkan sekolah. Pencegahan harus maksimal dilakukan sejak dini. Lantaran kasus kekerasan timbul malah dari orang-orang terdekat korban. Pendidikan seksual kepada anak sejak dini penting dilakukan. (kaltim.tribunnews.com, 20/09/2023)

Fakta di atas membuktikan bahwa perempuan tidak aman berada dalam lingkungan sekarang walaupun di keluarganya sendiri. Melihat hal ini, apa yang seharusnya kita lakukan?

Cara Pandang yang Salah

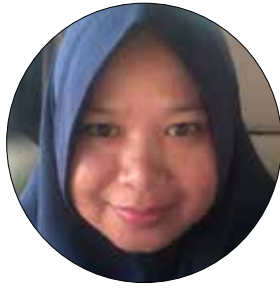
Secara fitrah, manusia memiliki gharizah nau' (naluri kasih sayang), naluri ini menuntut pemenuhan. Saat ini, cara pandang pemenuhannya mengacu pada Barat, yaitu segala sesuatu boleh asalkan mendapatkan kepuasan. Perempuan hanya dipandang sebagai objek pemuas saja.

Menurut sekularisme, agama hanya dianggap dogma. Peranannya sebatas pada ibadah. Sedangkan untuk menjalankan hidup, manusia leluasa memutuskannya. Maka, mereka akan menuruti nafsunya daripada mengikuti tuntunan agama. Inilah yang membuat orang bebas melakukan apa saja.

Selama memakai cara pandang dan aturan Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan terus meningkat. Undang-undang yang ada tidak dapat menjamin masalah ini terselesaikan dengan baik. Karena persoalannya bukan pada undang-undang saja, tetapi pada cara pandang yang salah.

Pencegahan berupa pendidikan seks usia dini di sekolahpun tidak mampu mencegah kekerasan pada anak jika tidak dibarengi dengan support sistem dari negara. Karena undang-undang tentang perempuan dan anak dibuat berlandaskan liberalisme. Aturan itu hanya menyentuh tindakan kekerasan, tidak menghukum jika dilakukan suka sama suka.

Banyaknya kasus kekerasan membuktikan



Oleh:

**Emirza Erbayanthi,
M.Pd**

Pemerhati Sosial

kan negara gagal melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Sistem kapitalisme sekuler liberal penyebab angka kekerasan pada perempuan dan anak mengkhawatirkan.

Penjagaan Islam Minim Kekerasan Selama setahun saja, kekerasan perempuan terjadi 8.000 lebih kasus. Berbeda ketika Islam berkuasa selama 13 abad. Kasus kekerasan seperti ini bisa dihitung jari.

Salah satunya adalah pelecehan muslimah di Amuria yang menyebabkan Khalifah Al-Mu'tasim mengirim-

kan pasukan dan menaklukkan wilayah itu. Peristiwa ini dikenang kaum muslim karena memperlihatkan kegagahan Islam dalam membela perempuan.

Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang sama dengan laki-laki. Mereka adalah rakyat yang harus terlindungi. Mereka berkedudukan mulia, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga suaminya. Peran ini luar biasa karena dibalik kesuksesan suami dan anak, ada perempuan yang kuat, sebagaimana ibu Imam Syafi'i dan Muhammad al-Fatih.

Islam tidak memandang perempuan sebagai makhluk pemuas laki-laki semata. Gharizah nau' pada keduanya hanya boleh dipenuhi dengan cara yang benar. Pemenuhannya tidak boleh sembarangan, apalagi dengan tindak kekerasan.

Islam memiliki sistem yang sempurna. Apabila seluruh aturan itu diterapkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah. Islam juga akan melindungi anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada perlakuan berbeda di antara mereka.

Penerapan sistem pergaulan Islam akan menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan. Mereka akan menundukkan pandangan jika bertemu dan hanya berinteraksi pada kondisi yang diperbolehkan.

Selain itu, mereka juga tidak akan berani berdua-duaan dengan nonmahram ataupun campur baur laki-laki dan perempuan tanpa alasan syar'i. Mereka juga wajib menutup aurat dengan sempurna.

Selain peraturan di ranah publik, Islam juga memberikan aturan dalam ranah rumah tangga. Bagaimana orang tua bersikap terhadap anaknya dan sebaliknya. Ada juga fikih suami dan istri yang akan membuat rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah jika diterapkan.

Islam juga memberikan sistem sanksi yang

tegas. Hukuman yang diterapkan dalam Islam berfungsi sebagai jawabir dan zawajir. Jawabir berarti hukuman yang dikenakan pada pelaku akan menebus dosanya. Sedangkan zawajir artinya hukuman yang diterapkan akan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama.

Kekerasan perempuan sering terjadi karena alasan ekonomi. Islam akan menutup pintu ini dengan menjamin kebutuhan setiap rakyatnya terpenuhi. Baik itu sandang, pangan, papan, kesehatan maupun pendidikan.

Bagi mereka yang tak memiliki pekerjaan, Islam akan membuka lapangan pekerjaan dari pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam), sehingga mereka akan menerima pendapatan yang cukup. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak bisa bekerja, mereka berada dalam tanggungan keluarga. Apabila keluarga tidak mampu, negara yang akan menanggungnya.

Semua biaya yang dikeluarkan negara akan diambil dari Baitul Mal. Badan keuangan Islam ini akan memperoleh harta dari pengelolaan SDA, jizyah, kharaj, fai, ganimah, harta tidak bertuan, harta dari perilaku curang, dan lain-lain. Seluruh pendapatan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Maka, tidak ada lagi alasan melakukan kekerasan.

Penerapan seluruh aturan Islam hanya dapat diterapkan oleh sistem pemerintahan Islam. Landasan pengambilan kebijakan adalah Islam.

Sebagaimana yang dilakukan Pemimpin kaum muslim, Khalifah al-Mu'tasim, yang akan melindungi rakyatnya dari kejahatan.

Banyaknya kasus kekerasan saat ini harusnya membuka mata kita bahwa sistem sekarang tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan terkesan dibiarkan saja. Kasus kekerasan bukannya tambah sedikit, tetapi tambah banyak.

Maka, jalan untuk memutus kekerasan perempuan dan anak, seperti dengan menerapkan Islam secara sempurna.

Sebagaimana firman Allah SWT.

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS Al-Baqarah: 208).

Islam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dengan berbagai sistem yang saling mendukung. Hukum kekerasan dalam Islam jelas haram. Karena Rasulullah memberi teladan untuk memperlakukan anak dan perempuan dengan kelembutan. Selamatkan perempuan dan anak dari kekerasan dengan Islam Kaffah.

Wallahualam.



SAMBUT BAIK PEMBANGUNAN DRAINASE, SAKIRMAN: SEMOGA BISA ATASI BANJIR



**KABUT ASAP KEMBALI TERJADI,
LEGISLATOR SARANKAN
PELAJAR GUNAKAN MASKER**



Pembangunan drainase di Jalan Diponegoro Kecamatan Tanjung Redeb.

SAMBUT BAIK PEMBANGUNAN DRAINASE, SAKIRMAN: SEMOGA BISA ATASI BANJIR

TANJUNG REDEB - Pembangunan dan peningkatan drainase di beberapa titik perkotaan di Kabupaten Berau masih berproses tahun ini. Yang mana utamanya untuk mengatasi genangan air hingga banjir yang masih terjadi di wilayah perkotaan Tanjung Redeb.

Hal itu disambut baik oleh Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman. Hanya saja dirinya menyarankan, selain fungsi drainase untuk irigasi tentunya keindahan kota pun harus dijaga. Sakirman juga mendorong pembangunan drainase dapat dituntaskan pun tidak ada yang mangkrak.

"Jaringan drainase yang masih diproses ada dua, ada yang langsung pada badan jalan dan langsung pada trotoar, semoga segera dituntaskan," ucapnya.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik banjir yang ada di daerah perkotaan. Diakuinya, pemasangan drainase pada jalur irigasi yang rawan banjir sebagian telah terpasang. "Semoga beberapa titik banjir yang ada di

Kabupaten Berau dapat teratasi," harapnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya sebatas pemasangan U-gutter (beton saluran) saja tapi tidak dituntaskan secara menyeluruh di bagian atasnya.

"Jangan hanya sebagian saja yang dikeramik dan sebagiannya tidak, jika seperti itu maka keindahan kotanya tidak didapat," tuturnya.

Terkait pemasangan drainase yang berada di sekitar GOR Pemuda yang terlihat merusak jalan. Dirinya menjelaskan pengerjaannya masih berjalan dan belum selesai. Semoga ketika telah selesai bisa diperbaiki jalan yang telah rusak akibat pemasangan drainase tersebut.

"Jangan hanya irigasinya yang ditingkatkan, pesangan keramik, penanaman pohon, dan lampu penerangan bisa dipasang. Mengingat jalan tersebut termasuk pintu masuk dan wajah bagi Kabupaten Berau," tandasnya. **(Adv/Mnz)**

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



Rudi Mangunsong sarankan pelajar gunakan masker, hindari kabut asap yang tebal.

KABUT ASAP KEMBALI TERJADI, LEGISLATOR SARANKAN PELAJAR GUNAKAN MASKER

TANJUNG REDEB - Kabut asap masih menyelimuti Bumi Batiwakkal belakangan ini. Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong. Terutama dapat berdampak pada sektor pendidikan.

Rudi menyarankan, agar peserta didik yang sedang bersekolah untuk menggunakan masker sebagai perlindungan diri. Yang mana, masker tersebut perlu difasilitasi dari instansi terkait.

"Hal ini termasuk bagian dari bencana, maka kepada dinas terkait saya harap bisa aktif memberikan masker buat anak sekolah," ungkapnya, Jumat (6/10/2023).

Dampak dari kabut asap yang saat ini terjadi tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia. Tapi juga dunia pendidikan. Dirinya menaruh perhatian pada para pelajar yang mungkin terganggu dengan kabut asap.

"Kabut asap ini menyerang pernapasan, dan anak-anak ini rentan. Saya mengimbau kepada para pelajar tetap gunakan masker dan orangtua perlu mengawasi anak-anak mereka," tuturnya.

Dirinya pun meminta instansi terkait untuk senantiasa melakukan pengecekan kadar kepekatan udara. Untuk segera lakukan penanganan kabut asap di Kabupaten Berau.

Rudi menambahkan, bila musibah ini semakin darurat, pihaknya menyarankan agar sekolah dapat menerapkan metode pembelajaran dari rumah atau daring.

"Kita harus waspada. Jangan sampai terkena ISPA. Itu sangat berbahaya. Karena kemarin saya perhatikan juga kabut di Berau pekat sekali," tutupnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

JANGAN ADA DISKRIMINASI PENDIDIKAN, MADRI: SEMUA ANAK BERHAK SEKOLAH

TANJUNG REDEB – Dengan APBD Berau yang mencapai Rp 5 triliun, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan jangan sampai terjadi diskriminasi pendidikan di Kabupaten Berau. Terutama antara daerah perkotaan dan perkampungan.

Adapun nggaran pendidikan dianggarkan sebanyak 20 persen dari APBD Berau. Momen ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.

“Contohnya dengan memberikan fasilitas kepada guru sebagai penunjang pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditingkatkan,” tuturnya.

Pun pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu harus terus dilakukan, meskipun saat ini sekolah gratis. Namun untuk penunjang lainnya masih tetap membayar. Tidak semua, orangtua mampu untuk membelikan seragam anaknya,

maupun buku. Hal inilah yang diminta Madri agar terus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait.

Madri menilai pendidikan sangat penting bagi bangsa dalam pembangunan daerah kedepannya. Pendidikan modal dasar bagi penerus bangsa, dalam menjalankan, mengamati, dan mengarahkan roda pemerintahan.

“Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau jangan sampai dibedakan. Untuk mendukung hal itu, pendataan penting, untuk memetakan, mana yang layak dapat bantuan dan tidak,” tegasnya.

Madri meminta peran OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap sekolah yang ada di Berau baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK, agar penerimaan anak untuk masuk kejenjang pendidikan tidak ada yang ditolak, dengan alasan kuota penuh.

“Jangan sampai kejadian-keja-

dian seperti itu terulang kembali,” ucapnya.

Madri juga memusatkan perhatiannya kepada anak-anak yang putus sekolah. Dirinya meminta Pemkab Berau agar melakukan upaya agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan ijazah untuk bekal dimasa depan.

“Jangan sampai, mereka ini hilang kesempatan, karena masalah ijazah,” pesannya.

Ia menilai, tidak ada salahnya membuka data, berapa warga Berau yang mengikuti pendidikan non formal tersebut. Karena, bisa dijadikan acuan untuk merumuskan pendidikan yang menyenangkan. Ia meminta instansi terkait juga bisa jemput bola, terhadap anak bermasalah hukum (ABH), agar bisa mendapatkan ijazah.

“Saya tidak mau tahu soal kendala. Saya hanya ingin, anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama,” tutupnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong.

SETUJUI RAPERDA PENGARUSUTAMAAN GENDER, OPTIMALKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

TANJUNG REDEB - Raperda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan akhirnya disetujui legislator untuk ditetapkan sebagai Perda Berau tahun 2023.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong menyebut, akhirnya Berau dapat mengimplementasikan program pusat tersebut, yang mana sebelumnya tidak bisa dilaksanakan lantaran belum ada regulasinya.

Dikatakan Feri, perda itu dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan daerah yang tidak bisa menjalankan program-program pusat.

"Kemarin itu ada program-program dari pusat yang tidak bisa kita laksanakan di Kabupaten Berau, ketika belum adanya perda dalam pemberdayaan gender," katanya, Jumat (6/10/2023).

Melihat ada peluang positif terhadap kesetaraan gender. Sehingga, dalam hal ini peran wanita benar-benar diutamakan dan dapat lebih berperan aktif.

Dalam hal ini, peran wanita lebih dioptimalkan dalam berbagai bidang. Seperti halnya, kondisi nyata di lingkungan Kabupaten Berau sendiri telah menerapkan kesetaraan gender. Yang menurutnya sudah berjalan sesuai peraturan berlaku.

"Pengarusutamaan gender itu lebih menitik beratkan pada kesetaraan dalam jenjang karir," ujarnya.

"Untuk di lingkungan Berau sendiri, kenyataannya bupati kita kan perempuan, dan juga Kepala Dinas juga ada yang dari kaum perempuan," imbuhnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau Rudi Mangunsong.

CEGAH PERUNDUNGAN DI SEKOLAH, LEGISLATOR IMBAU GURU AKTIF LAKUKAN PENYULUHAN

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong menyambut baik upaya sosialisasi pencegahan yang dilakukan OPD terkait untuk mencegah terjadinya kasus perundungan (bully) di satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA se-Kabupaten Berau.

Dirinya juga mengimbau kepada semua kepala sekolah dan guru untuk aktif melakukan pengawasan. Dengan cara memberikan materi norma-norma perilaku sosial yang baik dan benar.

"Materi-materi itu bagus diberikan sebelum kegiatan pembelajaran di mulai pada pagi hari," ucapnya Jumat (6/10/2023).

Meski peran guru dan kepala sekolah bersifat terbatas, menurut Rudi dengan sudah ada metode kurikulum merdeka yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Maka, ia pun mengimbau kepada orangtua harus aktif di rumah dalam membimbing tentang etika

berkomunikasi.

"Perilaku budi pekerti akhlak itu harus dimaksimalkan oleh orang tua di rumah juga dalam mengawasi karakter anak sebelum hidup bersosial dengan masyarakat," imbuhnya.

"Karena pendidikan karakter anak awal mula terbangun dari lingkungannya di rumah yaitu kedua orangtua harus peran aktif mewujudkan hal tersebut," sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat mendukung jika benar ada kasus pertama bully atau perundungan hingga kekerasan fisik oleh guru kepada siswa diselesaikan melalui ranah hukum.

"Karena kita tidak ingin kasus ini bakal terus berkelanjutan. Maka ya wajib hukumnya tindak tegas sesuai peraturan undang-undang yang berlaku," pungkasnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

KERATON DIREVITALISASI, SAGA NILAI BISA TARIK WISATAWAN

TANJUNG REDEB – Adanya revitalisasi di bangunan bersejarah yang dilakukan pemerintah diapresiasi Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga. Dia menilai, revitalisasi yang dilakukan di Keraton Sambaliung dan Museum Batiwakkal Gunung Tabur itu merupakan suatu langkah yang tepat.

“Pengerjaan harus maksimal dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat, terlebih anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi tersebut sekitar Rp 3,5 miliar,” katanya.

Dirinya mengaku mengapresiasi kegiatan positif tersebut. Terlebih dengan dilakukannya revitalisasi, menurutnya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

“Hal ini menurut saya sebagai upaya pemerintah menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke bangunan bersejarah yang ada,” tuturnya.

Saga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penataan dan membenahi fasilitas yang ada, tujuannya agar wisatawan yang berkunjung merasa nyaman.

“Kalau fasilitasnya mumpuni, maka wisatawan mau berkunjung untuk mengetahui sejarah dari keraton dan museum tersebut yang juga sejarah Kabupaten Berau,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar tempat wisata yang ada di Bumi Batiwakkal mendapatkan perhatian lebih. Khususnya kepada fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut.

“Selain fasilitas yang ada, akses menuju ke tempat wisatanya juga perlu diperhatikan, sehingga minat wisatawan bisa tinggi untuk berkunjung,” tandasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

SYARIFATUL RESPONS POSITIF RENCANA PEMASANGAN HYDRANT DI KAWASAN PADAT PEMUKIMAN

TANJUNG REDEB - Adanya rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memasang hydrant di kawasan padat pemukiman direspons positif Sekretaris Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

Ia mengaku, mendukung penuh wacana tersebut. Pasalnya, hydrant akan sangat bermanfaat jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran.

"Kita tidak mau kejadian yang sudah terjadi, terulang kembali. Maka dari itu, rencana pemasangan hydrant ini bisa jadi solusi," ungkapnya.

Ia menyebut, pemasangan hydrant dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. "Jadi masyarakat bisa menyambungkan selang air, sambil menunggu pemadam kebakaran datang ke

lokasi," terangnya.

Politikus Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Berau siap mendukung pemasangan hydrant tersebut. Terlebih hal itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Ini suatu wacana baik yang harus didukung. Apalagi kita ketahui di wilayah Tanjung Redeb banyak gang sempit serta padat pemukiman," katanya.

Kendati demikian, Syarifatul mendorong pemerintah untuk memperhatikan suatu hal yang berkaitan dengan penanganan bencana.

"Itu harus didukung penuh, karena kita tidak tahu kapan terjadinya bencana. Maka dari itu lebih baik sedia payung sebelum hujan," pungkasnya. (adv/dez)

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI SABTU
7 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



OKNUM PENGACARA **RUDAPAKSA** ANAK USIA 13 TAHUN



**BUAYA RISKA MASUK KANDANG
KARANTINA DI PENANGKARAN
BUAYA TRITIP BALIKPAPAN**



Oknum pengacara berinisial ER saat diperiksa penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan terkait dugaan kasus rudapaksa anak usia 13 tahun.

OKNUM PENGACARA RUDAPAKSA ANAK USIA 13 TAHUN

BALIKPAPAN - Seorang oknum pengacara di Kota Balikpapan ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) sekitar pukul 22.30 Wita di rumahnya yang terletak di kawasan AW Syahrani atau Somber, Balikpapan Utara terkait dugaan kasus rudapaksa terhadap anak berusia 13 tahun.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, Kompol Ricky Sibarani mengatakan, penetapan tersangka kepada ER sebetulnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun karena yang bersangkutan mengajukan pra peradilan, maka penahanan terhadapnya sementara waktu sempat ditangguhkan.

"Di mana ER ini sudah kami tetapkan tersangka, setelah sebelumnya kami tetapkan sebagai DPO karena tidak berada di tempat. Dia sempat mengajukan praperadilan ke kami," ujarnya, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut Ricky Sibarani menjelaskan, modus pelaku adalah mengantarkan kor-

bannya pulang. Namun, saat di perjalanan pulang, korban lebih dulu diajak singgah ke sebuah penginapan di Kota Balikpapan. Hingga akhirnya korban pun mendapat paksaan dari pelaku.

"Bahwa korban itu mau diantar pulang oleh tersangka. Namun, korban malah diajak ke hotel dan di situ terjadi persetubuhan dengan pemaksaan," jelasnya.

Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Balikpapan.

"Kami bawa ke Polresta Balikpapan. Sampai saat ini masih kami lakukan pemeriksaan sebagai tersangka," tambahnya.

Disinggung hasil visum korban, Kasat Reskrim Polresta Balikpapan mengaku jika hasil visumnya sudah keluar. "Jadi memang ada luka robek pada kemaluan korban," tegasnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang

BAHASA INGGRIS BAKAL JADI MAPEL WAJIB DI JENJANG SD, PARLINDUNGAN : BAHASA NASIONAL LEBIH WAJIB

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menilai rencana pemerintah mewajibkan mata pelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD sudah berlebihan. Hal itu bakal menyulitkan bagi anak usia sekolah dasar di tingkat daerah. Berbeda dengan sekolah yang sudah maju dan siswanya memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, dirinya sudah mendengar wacana Bahasa Inggris menjadi pelajaran wajib di tahun depan. Ia menilai seharusnya mata pelajaran bahasa asing hanya bersifat sebagai tambahan. Karena bahasa nasional yang wajib menjadi pegangan utama bagi pelajar sejak tingkat dasar.

"Kalau ini wajib sebagai pen-

ganti pelajaran di tingkat SD, saya pikir ini berlebihan. Bagaimanapun kita punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bangsa kita berbahasa Indonesia. Itu kan ciri khas kita," ujarnya, Jumat (6/10/2023).

Selain itu menurut Parlindungan, penggunaan bahasa asing juga harus mempertimbangkan kemampuan orangtua. Karena pembelajaran di sekolah tetap memerlukan dukungan dari rumah. Padahal tidak banyak para orangtua yang bisa berbahasa Inggris. Mereka biasa menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan anaknya.

"Bagaimanapun kita punya bahasa nasional. Kapan lagi kita bangga sebagai warga negara kalau kita tidak pakai bahasa kita sendiri. Dan lagi, apa semua

orang tua mampu membantu anaknya berbahasa Inggris," jelasnya.

Parlindungan berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan mewajibkan bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Meski para tenaga pendidik sedang mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan di sekolah. Termasuk membuka formasi calon PNS untuk guru bahasa Inggris.

"Masyarakat kita ini bahasa Indonesia saja masih bermacam-macam daerah. Saya pikir ini dulu kita perbaiki. Bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Meski tidak harus baku," tutupnya. (ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Buaya Riska yang saat ini berada di kandang karantina di penangkaran buaya Tritip Balikpapan.

BUAYA RISKA MASUK KANDANG KARANTINA DI PENANGKARAN BUAYA TRITIP BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Penangkaran buaya Tritip telah menerima buaya fenomenal "Riska" pada Rabu (4/10/2023) dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Kedatangan buaya Riska ini berdasarkan permintaan BKSDA Kaltim yang menerima sejumlah keluhan masyarakat Kawasan Guntung, Bontang perihal adanya buaya yang memangsa manusia.

Pengelola penangkaran buaya Tritip Balikpapan, Arif Anggoro mengatakan, pihaknya hanya menerima seekor buaya dari Kota Bontang. Namun, kepastian apakah itu buaya Riska atau bukan pihaknya tidak bisa memastikan.

"Tapi kemarin Pak Ambo itu datang ke sini dan menemui buaya tersebut. Sehingga kemungkinan memang benar itu Riska," ujarnya, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut Arif menjelaskan, buaya yang diterimanya tersebut memiliki panjang 4,42 meter dengan jenis kelamin jantan. Dan saat ini buaya tersebut sedang mengalami karantina di kandang terpisah.

"Kami karantinakan di salah satu kandang, kami sebut itu kandang pembesaran nomor

5. Dalam kolam itu ukuran 6x12 meter, dia sendirian," jelasnya.

Dikatakan Arif jika di penangkaran buaya Tritip Balikpapan menerima titipan buaya dari manapun, termasuk dari lembaga konservasi. "Harus dikarantina selama 3-7 hari. Jadi dimohon tidak melakukan aktivitas berlebihan di sekitar kolam tersebut selama Karantina," tambahnya.

Saat ini kondisi buaya Riska dalam keadaan baik-baik saja dan masih dalam masa kelelahan usai perjalanan cukup jauh.

"Buaya Riska dalam keadaan baik-baik saja. Namun selama berinteraksi, belum mau makan. Karena Pak Ambo datang itu baru hari kedua, mungkin masih jetlag ya kalau manusia," ujar Arif lagi.

Buaya Riska terus mendapat pemantauan dari pihak BKSDA Kaltim selama berada di penangkaran buaya Tritip Balikpapan ini. Nanti setelah selesai karantina, jika kondisinya masih normal akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar lagi.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



ADA 1.226 PEMILIH DISABILITAS DI PASER, KPU MAKSIMALKAN LAYANAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA



**BKPSDM SEGERA UJI KOMPETENSI,
ISI 5 JABATAN ESELON II DI PASER**

ADA 1.226 PEMILIH DISABILITAS DI PASER, KPU MAKSIMALKAN LAYANAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA

PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser memastikan, sebanyak 1.226 orang penyandang disabilitas sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lebih rinci, Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan, pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di 10 Kecamatan ini, terbagi menjadi 4 kategori. Dari kategori itu, disabilitas fisik jadi yang terbanyak.

"Disabilitas fisik di Kabupaten Paser sebanyak 633 pemilih, lalu disabilitas sensorik sebanyak 290 pemilih, disabilitas mental sebanyak 229 pemilih dan disabilitas intelektual sebanyak 74 pemilih," kata Qayyim saat ditemui, Jumat (6/10/2023).

Dari jumlah itu, diuraikan Qayyim, disabilitas sensorik dibagi menjadi 3 kategori, yakni disabilitas sensorik wicara sebanyak 131 pemilih, disabilitas sensorik netra sebanyak 99 pemilih dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 60 pemilih.

"Jadi jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam DPT, mencapai 0,58 persen dari total DPT," ucapnya.

Qayyim menyebut, dalam memberikan layanan maksimal kepada pemilih disabilitas saat pemungutan suara nanti, pihaknya akan memberikan fasilitas yang memudahkan pemilih berkebutuhan khusus ini, agar memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya.

Untuk memberikan kenyamanan pada pemilih penyandang disabilitas, KPU akan menyiapkan sejumlah fasilitas seperti akses khusus disabilitas di TPS, antrean ramah disabilitas, hingga desain surat suara yang memudahkan pemilih disabilitas.

"Itu nanti kami siapkan di setiap TPS yang ada pemilih berkebutuhan khusus. Jadi, aksesibilitas bagi



Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

Rabu 14 Februari 2024

JUMLAH PEMILIH DISABILITAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kecamatan	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
BATU SOPANG	51	1	22	9	0	9
TANJUNG HARAPAN	17	2	5	5	0	2
PASER BELECKONG	60	7	12	12	11	12
TANAH GROGOT	121	14	52	31	13	18
KUARO	72	6	33	18	12	8
LONG IKIS	134	10	43	19	11	24
MUARA KOMAM	28	8	15	12	0	7
LONG KALI	109	18	28	18	8	14
BATU ENGAU	30	5	11	3	2	2
MUARA SAMU	11	3	8	4	3	3
TOTAL	633	74	229	131	60	99

www.kab-paser.kpu.go.id | kpu_kab_paser | KPU Kab Paser | @KPU_Paser | KPU Kab Paser

pemilih, itu yang juga masuk dalam layanan maksimal kami," ujarnya.

Misalnya untuk pemilih disabilitas sensorik netra, diperbolehkan untuk menentukan sendiri siapa pendampingnya, dan pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih di bilik suara. Hal ini ditujukan, guna memperlancar proses pemungutan suara.

Sementara itu, KPU Kabupaten Paser telah menetapkan ada 211.377 pemilih dalam DPT Pemilu 2024. Jika dibandingkan DPT Pemilu 2019, jumlah pemilih ini bertambah Penambahan itu mencapai 25.690 DPT, sesuai jumlah DPT di Pemilu 2019 sebanyak 175.687 DPT.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito

BKPSDM SEGERA UJI KOMPETENSI, ISI 5 JABATAN ESELON II DI PASER

PASER - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser segera melakukan uji kompetensi terhadap Jabatan Tinggi Pratama (JTP) yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser pada Oktober 2023 ini.

Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito menuturkan, saat ini ada 5 jabatan eselon II yang kosong disebabkan purna tugas, pergeseran tempat, dan kenaikan status Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Beberapa kepala dinas pensiun, saat ini telah diterbitkan pelaksana tugas. Itu akan terisi setelah dilakukan uji kompetensi di antara beberapa dinas," tutur Suwito

Di antaranya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Paser, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Paser dan Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Paser yang telah purna tugas atau pensiun.

Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, yang pejabatnya kini bergeser menjadi Direktur Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Otorita IKN, dan terakhir Direktur RSUD Panglima Sebaya dikarenakan kenaikan status menjadi kelas B.

Dari hasil uji kompetensi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). BKPSDM akan menerima hasil rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara

(KASN) terkait posisi yang cocok sesuai kapasitas, kemudian, jabatan yang masih kosong akan dilakukan lelang di November 2023.

"Pelantikan di akhir November 2023 dan penempatan jabatan sesuai dengan kebutuhan," bernya.

Lanjut dia, persyaratan untuk mengikuti seleksi eselon II. ASN tersebut sebelumnya harus sudah menduduki jabatan eselon III minimal dua tahun dan memiliki nilai kinerja yang bagus selama dua tahun.

"Dengan ketentuan syarat tersebut, kami mengakui masih banyak tersedia SDM di Paser," tambahnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
7 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



KONSER ROSSA ANOTHER JOURNEY THE BEGINNING, IDN PILIH SAMARINDA JADI KOTA PERTAMA DI KALIMANTAN





Konferensi pers H-1 Rossa Another Journey The Beginning. (Media Kaltim)

KONSER ROSSA ANOTHER JOURNEY THE BEGINNING, IDN PILIH SAMARINDA JADI KOTA PERTAMA DI KALIMANTAN

SAMARINDA- KarnavALL Musik Kalimantan yang dipersembahkan oleh Accor Live Limitless akan berkolaborasi dengan IDN untuk menggelar konser Rossa Another Journey The Beginning pada Sabtu (7/10/2023) di Convention Hall Sempaja Samarinda.

Kota Samarinda menjadi kota pertama yang terpilih mewakili Kalimantan untuk event tersebut.

Direktur Operasional Accor Indonesia, Endrian Hananto mengatakan, konser yang bertema Another Journey The Beginning ini adalah lebih menyasar ke anak muda. Dan Rossa akan membawakan album terbaru yang bergaya anak muda.

"Samarinda ini kan banyak sekali anak muda, lebih ke kota pelajar gitu. Saya rasa konser Rossa ini cocok digelar di Samarinda," ungkap Endrian, Jumat (6/10/2023) di Hotel Mercure Samarinda.

IDN sendiri belum pernah menyentuh daerah Kalimantan. Dan Samarinda menjadi salah satu untuk mewakili Kalimantan.

Di sisi lain, Direktur Utama Inspire IDN, P. Intan S menyatakan, tiket konser Rossa Another Journey The Beginning nyaris 100 persen terjual.

"Tiket yang berjumlah 3.000 itu sudah nyaris habis. Sudah mencapai 97 persen," katanya.

Hingga saat ini tiket masih bisa dibeli melalui aplikasi ALL. Dan khusus untuk member Accor akan mendapatkan diskon 15 persen.

"Bagi yang ingin bergabung ke dalam Accor itu free alias gratis. Sehingga untuk pembelian tiket bisa mendapatkan diskon sebesar 15 persen," pungkas Intan.

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat diwawancara awak media. (ANTARA/Fandi)

PJ GUBERNUR KALTIM SEBUT IKN SIMBOL IDENTITAS BANGSA DAN PUSAT INOVASI EKONOMI BARU

SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menjadi perhatian sentral pemerintah pusat sebagai simbol identitas bangsa dan tata kelola pembangunan Indonesia.

"IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai membuka akses ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan," kata Akmal Malik di Samarinda, Kamis (5/10/2023).

Ia menambahkan IKN Nusantara juga menjadi pusat inovasi ekonomi baru, yang bisa membawa multiplier effect distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata ke seluruh wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita harus bersyukur karena Kaltim akan menjadi salah satu titik bagi penyebaran kemampuan ekonomi ke wilayah Timur Indonesia," katanya.

Akmal Malik mengapresiasi langkah DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

"Kebijakan Ini adalah momentum yang harus disambut dengan baik. Mari kita bersatu memajukan pembangunan melalui delapan sektor strategis, ini kan warisan dari Pak Isran Noor (mantan Gubernur Kaltim) yang sudah disepakati bersama," kata dia.

Ia mengemukakan delapan sektor strategis tersebut adalah sektor ekonomi dan industri, logistik dan konektivitas, SDM dan ketenagakerjaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pariwisata dan ekonomi kreatif, energi dan pertambangan, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya alam.

Akmal Malik juga menyampaikan di tengah-tengah tantangan global, potensi ancaman, dan kepentingan tarik-menarik ekonomi luar negeri, Indonesia mendapatkan informasi yang memberikan angin segar bagi Indonesia dan juga Kalimantan Timur.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kaltim, ayo kita menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Karena Kaltim akan menjadi salah satu penentu bagaimana Indonesia akan bertransformasi ke depan," tuturnya. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto
Editor : Budi Suyanto



BANDARA KALTIM TERBANGKAN 211.254 PENUMPANG DOMESTIK DI AGUSTUS

SAMARINDA - Sejumlah bandara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerbangkan 211.254 penumpang domestik pada Agustus 2023, atau terjadi penurunan 6,83 persen ketimbang bulan sebelumnya yang sebanyak 226.738 penumpang.

"Penurunan terjadi karena adanya penurunan jumlah penumpang pada tiga bandara yang merupakan jalur utama penerbangan dari Kaltim ke sejumlah daerah," ujar Ketua Tim Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Marinda Dama Prianto di Samarinda, Jumat.

Tiga bandara tersebut adalah Bandara SAMS Sepinggian di Kota Balikpapan yang mengalami penurunan 7,46 persen, Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda turun 5,67 persen, dan Bandara Kalimantan di Kabupaten Berau turun 2,49 persen.

Bahkan Bandara Bontang di Kota Bontang juga mengala-

mi penurunan 2,06 persen. Sebaliknya, terjadi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Dauh Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu terjadi kenaikan 38,84 persen, Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat naik 2,67 persen.

Menurutnya, jumlah penumpang domestik terbanyak pada Agustus adalah penumpang yang melalui Bandara SAMS Sepinggian, yakni mencapai 164.874 orang atau berkontribusi 78,05 persen dari total penumpang domestik.

Diikuti Bandara APT Pranoto Samarinda dengan jumlah penumpang sebanyak 31.633 orang, atau memberikan kontribusi sebesar 14,97 persen dari total penumpang domestik.

Dilanjutkannya, untuk jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri/internasional pada Agustus 2023 sebanyak 4.413 orang, terjadi kenaikan sebesar 29,64 persen jika dibandingkan

dengan Juli 2023.

Sementara untuk jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri (internasional) pada Januari sampai Agustus 2023 tercatat sebanyak 27.613 orang, naik signifikan hingga mencapai 883,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia juga mengatakan, untuk jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 34.995 orang, pun terjadi penurunan 31,78 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Penurunan terjadi karena adanya penurunan jumlah penumpang di Pelabuhan Samarinda sebesar 45,88 persen, kemudian di Pelabuhan Semayang Balikpapan sebesar 28,99 persen. Keduanya merupakan pelabuhan angkutan penumpang laut utama di Kaltim.

Pewarta : M.Ghofar

Editor : Ahmad Wijaya



ANTARA / HO DPMPD Kaltim

Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Aswanda)

BLT DANA DESA KALTIM TERSALURKAN RP 92,13 MILIAR

SAMARINDA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sampai Rabu, 4 Oktober 2023 dari semua pemerintah desa ke masyarakat penerima manfaat yang tersebar pada tujuh kabupaten, sudah tersalurkan Rp92,13 miliar atau sebesar 68,84 persen.

"Dari total BLT sebesar Rp133,84 miliar tahun ini, kami bersyukur sudah tersalurkan senilai Rp92,13 miliar," ujar Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Aswanda di Samarinda, Kamis (5/10/2023).

Jenis keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa, adalah keluarga dengan kriteria miskin ekstrem desil satu, keluarga dengan kriteria miskin ekstrem desil dua sampai empat, keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

Kemudian keluarga dengan anggota berpenyakit kronis atau akut atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan rumah tangga tunggal dengan penghuni lanjut usia. Masing-masing KPM menerima BLT senilai Rp300 ribu per bulan selama setahun.

Sedangkan rincian penyaluran sebesar Rp92,13 miliar tersebut adalah pada triwulan

pertama disalurkan senilai Rp33,28 miliar, triwulan kedua senilai Rp32,35 miliar, triwulan tiga senilai Rp26,5 miliar, dan untuk triwulan empat belum dilakukan penyaluran karena masih dalam proses.

Ia melanjutkan, BLT Dana Desa yang telah disalurkan senilai Rp92,13 miliar ini untuk 37.179 KPM yang tersebar di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Paser sebanyak 4.829 KPM dengan BLT yang diterima total senilai Rp12,56 miliar atau 72,29 persen.

Lantas di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 8.946 KPM dengan BLT Dana Desa yang telah diterima senilai Rp21,48 miliar atau 66,72 persen, Kabupaten Berau dengan penerima 4.539 KPM senilai Rp11,44 miliar atau 70,02 persen.

Kabupaten Kutai Barat sebanyak 8.177 KPM dengan nilai Rp21,13 miliar atau tercapai 71,78 persen, Kabupaten Kutai Timur terdapat 6.929 KPM dengan total yang diterima mencapai Rp15,76 miliar atau 63,17 persen.

"Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 1.485 KPM dengan BLT senilai Rp4 miliar atau 75 persen, dan Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 2.274 KPM dengan BLT yang telah diterima senilai Rp5,74 miliar atau 70,17 persen," kata Aswanda. (Ant/MK)

Pewarta : M.Ghofar
Editor : Tunggul Susilo



WARGA GUNUNG LINGAI DITANGKAP, KEDAPATAN SIMPAN 2 PAKET SABU DI JOK MOTOR

SAMARINDA - Polsek Palaran, Polresta Samarinda, Polda Kaltim kembali mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukumnya dengan mengamankan 1 orang pelaku serta 2 paket sabu pada Kamis (05/10/23).

Kapolsek Palaran Kopol Zarma Putra yang memimpin langsung pengungkapan kasus tersebut menjelaskan, pihaknya kerap mendapat informasi dari masyarakat melalui hotline piket siaga Polsek Palaran di nomor 0811 5557 110 tentang maraknya peredaran narkoba di wilayahnya.

Mendengar adanya informasi tersebut, Kapolsek pun geram dan langsung memimpin tim opsional untuk melakukan pengungkapan. Yakni dengan melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang telah dicurigai dengan berbekal ciri-ciri yang telah diberikan oleh masyarakat tentang orang yang diduga melakukan peredaran Narkoba tersebut.

Pada Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 16.00 Wita, di jalan Trikora, Kapolsek dan tim opsional telah mengamankan seorang laki-laki dan melakukan penggeledahan badan serta kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku.

"Saat penggeledahan pun membuahkan hasil dengan ditemukan ya 2 paket sabu di dalam jok motor yang terbungkus oleh kertas putih," ungkap Kapolsek Palaran Kopol Zarma Putra pada Jumat (6/10/2023).

Kapolsek mengatakan, setelah mendapat barang bukti berupa 2 paket sabu dirinya

langsung membawa pelaku ke Mako Polsek Palaran untuk dilakukan interogasi terkait kepemilikan sabu tersebut.

"Dari hasil pengungkapan tersebut kami amankan 1 orang pelaku berinisial SY(42), yang merupakan warga Gunung Lingai Samarinda, 2 paket sabu dengan berat 1,22 dan 1,22 gram bruto, 2 unit handphone dan 1 unit sepeda motor merk Honda yang digunakan oleh pelaku untuk mengedarkan sabu," terang Kapolsek.

Dijelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan juga pengembangan jaringan narkoba tersebut.

Untuk pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Sub Pasal 112 Sub pasal Subs 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

"Kepada semua warga diharapkan tidak bermain-main dengan narkoba. Selain merugikan diri sendiri, ancaman hukumannya cukup tinggi," imbuhnya.

Untuk itu apabila masyarakat menemukan atau mengetahui segera laporkan ke hotline piket siaga Polsek Palaran di nomor 0811 5557 110 atau menghubungi layanan call center 110 Polresta Samarinda. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari

 **Grand Kartika**
HOTEL

OK!

TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp 698.000,- **30% OFF**

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs **BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com